

ABSTRAK
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

OLEH

KARINA SALSABILA PUTRI ALAWI

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perlindungan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah UPTD PPA Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas UPTD PPA, pekerja sosial, pihak kepolisian, serta orang tua korban. Analisis data menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang meliputi hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya sesuai dengan indikator teori peran. Pada aspek hak dan kewajiban, UPTD PPA memberikan perlindungan melalui penerimaan laporan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pada aspek fungsi sosial, UPTD PPA memberikan pendampingan sejak tahap pelaporan, layanan psikologis, dan dukungan sosial bagi korban serta keluarganya. Pada aspek perilaku yang diharapkan, petugas menunjukkan sikap profesional, empatik, dan tidak menghakimi dalam pelayanan. Pada aspek norma, pelaksanaan peran mengacu pada peraturan perlindungan anak, pedoman pembentukan UPTD PPA, serta SOP layanan yang berlaku. UPTD PPA juga berperan dalam pendampingan dan koordinasi selama proses hukum guna memastikan hak-hak korban terpenuhi. Secara keseluruhan, UPTD PPA telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban sesuai tugas dan kewenangannya

Kata Kunci: UPTD PPA, Kekerasan Seksual Pada Anak, Peran Pemerintah

ABSTRACT

THE ROLE OF BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT IN HANDLING CASES OF CHILD SEXUAL VIOLENCE

By

KARINA SALSABILA PUTRI ALAWI

The increasing number of child sexual violence cases requires an active role from local governments in providing integrated and sustainable protection services. One institution responsible for carrying out this role is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Bandar Lampung City. This study aims to describe the role of UPTD PPA in handling child sexual violence cases. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving UPTD PPA officers, social workers, police officers, and parents of victims. Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's role theory, which consists of rights and obligations, social functions, expected behavior, and norms or rules governing roles. The findings indicate that UPTD PPA of Bandar Lampung City has performed its role in accordance with the indicators of role theory. In terms of rights and obligations, UPTD PPA provides protection through child-friendly reporting services, maintaining the confidentiality of victims' identities, and coordinating with law enforcement agencies. Regarding social functions, UPTD PPA provides assistance from the reporting stage, psychological services, and social support for victims and their families. In terms of expected behavior, officers demonstrate professionalism, empathy, and a non-judgmental attitude in delivering services. Concerning norms, the implementation of its role refers to child protection regulations, guidelines for the establishment of UPTD PPA, and applicable service standard operating procedures. UPTD PPA also plays a role in providing assistance and coordination throughout the legal process to ensure that victims' rights are fulfilled. Overall, UPTD PPA has carried out its role in providing protection, assistance, and recovery services for victims in accordance with its duties and authority.

Keywords: UPTD PPA, Sexual Violence Against Children, Government's Role.